



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/2/2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan APIP, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dengan fokus pada:
- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penguatan tata kelola kerja pemerintahan dan penegakan integritas;
 - d. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
 - e. mandatory Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, meliputi :

1. Administrasi umum
2. Urusan pemerintahan

II. SASARAN PEMERIKSAAN

Sasaran pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, meliputi :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. Pemeriksaan Investigasi
 - b. Penjatuhan Administratif
 - c. Perhitungan Kerugian Negara
3. Pengawasan yang bersifat mandatori -
 - a. Kinerja rutin pengawasan
 - b. Pengawasan Prioritas Nasional
 - Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawasan intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
 - Operasional Sapu bersih pungutan liar
 - Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis Gender.
 - Dana Desa.
 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan.

**III. OBYEK YANG DIPERIKSA, JADWAL PELAKSANAAN JUMLAH TIM /
TENAGA, ANGGARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
					f	g			Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1	IRBAN BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN																		
1	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan Pemda yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	Maret	v				Maret		v			1 LHR
2	OPD Tim I	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR
3	OPD Tim II	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR
4	OPD Tim III	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR
5	OPD Tim IV	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR
6	OPD Tim V	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR
7	OPD Tim VI	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR
8	OPD Tim VII	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR
9	OPD Tim VIII	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	Februari			v		Februari				v	1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
10	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu APBD 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	September			v		September				v	1 LHR
11	OPD Tim I	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	September			v		September				v	8 LHR
12	OPD Tim II	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	September			v		September				v	1 LHR
13	OPD Tim III	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	September			v		September				v	1 LHR
14	OPD Tim IV	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	September			v		September				v	1 LHR
15	OPD Tim V	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	September			v		September				v	1 LHR
16	OPD Tim VI	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	September			v		September				v	1 LHR
17	OPD Tim VII	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2027 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	8 HP	Rp. 20.800.000	September			v		September				v	1 LHR
18	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu APBD-P Perubahan 2026 Pemda 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	September	v				September		v			1 LHR
19	1. Dinas Kesehatan.	Reviu Dana DAK OPD Tahap I TA. 2026	2026	Tinggi	PJ WPJ	1 orang 1 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	April			v		April				v	1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
	2. RSUD. 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan	1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai bketentuan yang berlaku			PT KT AT	1 orang 1 orang 4 orang													
20	1. Dinas Kesehatan. 2. RSUD. 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas kelautan dan perikanan	Reviu Dana DAK OPD Tahap II TA. 2026 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	September	v				September	v				1 LHR
21	1. Dinas Kesehatan. 2. RSUD. 3. Dinas Penegendalian	Reviu Dana DAK OPD Tahap III TA. 2026 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Desember	v				Desember	v				1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
	Penduduk Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas kelautan dan perikanan																			
22	Pemerintah Daerah (Badan Keuangan)	Reviu atas SHS (Standar Harga Satuan) Tujuan: Penelaahan ulang dan memberikan keyakinan terbatas bahwa SSH telah disusun sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan perbaikan	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Juni	v					Juni		v			1 LHR
23	Pemerintah Daerah (Badan Keuangan)	Reviu atas Analisa Standar Biaya Tujuan: Penelaahan ulang dan memberikan keyakinan terbatas bahwa ASB telah disusun sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan perbaikan	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Juni	v					Juni		v			1 LHR
24	Dinas Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuaipan/ gratifikasi/ pemerasan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Juli			v			Juli				v	1 LHR
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Juli			v			Juli				v	1 LHR
26	Dinas Kependudukan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuaipan/ gratifikasi/ pemerasan	2026	Tinggi	PJ WPJ	1 orang 1 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Juli			v			Juli				v	1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
	dan Pencatatan Sipil				PT KT AT	1 orang 1 orang 4 orang													
27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Juli			v		Juli				v	1 LHR
28	Tim I OPD	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas optimalisasi penerimaan daerah	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Agustus	v				Agustus		v			1 LHR
29	Tim II OPD	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas optimalisasi penerimaan daerah	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Agustus	v				Agustus		v			1 LHR
30	Tim III OPD	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas optimalisasi penerimaan daerah	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Agustus	v				Agustus		v			1 LHR
31	OPD Tim I	Monitoring atas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026 Triwulan I Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belanja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prosedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	April			v		April				v	1 LHM
32	OPD Tim II	Monitoring atas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026 Triwulan II Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belanja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prosedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Juli			v		Juli				v	1 LHM
33	OPD Tim III	Monitoring atas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026 Triwulan III Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belanja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prosedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Oktober			v		Oktober				v	1 LHM

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
34	OPD Tim IV	Monitoring atas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026 Triwulan IV Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belanja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prosedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Desember			v		Desember				v	1 LHM
35	Badan Keuangan	Reviu SP2D 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan dokumen SP2D telah sesuai dengan dokumen pendukungnya	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp. 26.000.000	Januari			v		Januari				v	1 LHR
36	Tim I Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja Tujuan : Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	Maret			v		Maret				v	1 LHA
37	Tim II Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja Tujuan : Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	Maret			v		Maret				v	1 LHA
38	Tim III Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja Tujuan : Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	Maret			v		Maret				v	1 LHA
39	Pemerintah Daerah	Reviu atas Dokumen Dana Alokasi Umum <i>Specific Grant</i> (DAU SG) Tahap I TA. 2026	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	Februari		v			Februari				v	1 LHR
40	Pemerintah Daerah	Reviu atas Dokumen Dana Alokasi Umum <i>Specific Grant</i> (DAU SG) Tahap II TA. 2026	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	April		v			April				v	1 LHR
41	Pemerintah Daerah	Reviu atas Dokumen Dana Alokasi Umum <i>Specific Grant</i> (DAU SG) Tahap III TA. 2026	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	Juli		v			Juli				v	1 LHR
42	Pemerintah Daerah	Reviu atas Dokumen Dana Alokasi Umum <i>Specific Grant</i> (DAU SG) Tahap IV TA. 2026	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	10 HP	Rp. 22.900.000	Oktober		v			Oktober				v	1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
					AT	3 orang			Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
II		IRBAN BID. KESRA																		
1	Tim I Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari	√					Januari	√				1 LHA
2	Tim II Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari	√					Januari	√				1 LHA
3	Tim III Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari	√					Januari	√				1 LHA
4	Tim IV Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari	√					Januari	√				1 LHA
5	Tim V Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari	√					Januari	√				1 LHA
6	Tim VI Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari	√					Januari	√				1 LHA
7	Tim VII Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari	√					Januari	√				1 LHA
8	Tim VIII Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari				√		Januari				√	1 LHA
9	Tim I Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari				√		Januari				√	1 LHA
10	Tim II Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari				√		Januari				√	1 LHA
11	Tim III Opname kas bendahara	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi	2025		PJ WPJ PT	1 orang 1 orang 1 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari				√		Januari				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
	sekolah di wilayah	pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah			KT AT	1 orang 3 orang													
12	Tim IV Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
13	Tim V Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
14	Tim VI Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
15	Tim VII Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
16	Tim VIII Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
17	Tim I Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
18	Tim II Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
19	Tim III Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
20	Tim IV Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
21	Tim V Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
22	Tim VI Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√				Mei		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
23	Tim VII Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√					Mei		√			1 LHA
24	Tim VIII Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei	√					Mei		√			1 LHA
25	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 1	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Maret				√		Maret				√	1 LHR
26	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 2	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Juni				√		Juni				√	1 LHR
27	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 3	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	September				√		September				√	1 LHR
28	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 4	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Desember				√		Desember				√	1 LHR
29	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2026	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	April				√		April				√	1 LHA
30	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2026	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	April				√		April				√	1 LHA
31	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan `memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2026	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Oktober	√					Oktober		√			1 LHA
32	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan	2026	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Oktober	√					Oktober		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
		jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku																		
33	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2026	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Oktober	√					Oktober		√			1 LHA
34	Dinas Pendidikan/BOP Tim 1	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei				√		Mei				√	1 LHA
35	Dinas Pendidikan/BOP Tim 2	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei				√		Mei				√	1 LHA
36	Dinas Pendidikan/BOP Tim 3	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei				√		Mei				√	1 LHA
37	Dinas Pendidikan/BOP Tim 4	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei				√		Mei				√	1 LHA
38	Dinas Pendidikan/BOP Tim 5	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Mei				√		Mei				√	1 LHA
39	Dinas Pendidikan	Audit Tujuan tertentu atas Perjalanan Dinas/Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data jumlah guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah/TPP telah sesuai dengan dokumen pendukungnya Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember		√			1 LHA
40	OPD 1	Audit Tujuan tertentu atas Perjalanan Dinas/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember		√			1 LHA
41	OPD 2	Audit Tujuan tertentu atas Perjalanan Dinas/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember		√			1 LHA
42	OPD 3	Audit Tujuan tertentu atas belanja Perjalanan Dinas/	2026	Tinggi	PJ WPJ	1 orang 1 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
		Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku			PT KT AT	1 orang 1 orang 3 orang													
43	OPD 4	Audit Tujuan tertentu atas belanja honorarium/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja honorarium telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember	√			1 LHA
44	OPD 5	Audit Tujuan tertentu atas belanja honorarium/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja honorarium telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember	√			1 LHA
45	OPD 6	Audit tujuan tertentu atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember	√			1 LHA
46	OPD 7	Audit tujuan tertentu atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember	√			1 LHA
47	OPD 8	Audit tujuan tertentu atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember	√			1 LHA
48	OPD 9	Audit Ketaatan atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember	√			1 LHA
49	Pemda	Reviu RKPD/kesesuaian informasi dalam RKPD dengan informasi dalam RPJMD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	April				√		April			√	1 LHA
50	Pemda	Reviu RKPDP/kesesuaian informasi dalam RKPD P dengan informasi dalam RPJMD P dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Juni				√		Juni			√	1 LHA
51	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan informasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	September	√					September	√			1 LHA
52	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan informasi dalam RKPD	2027	Tinggi	PJ WPJ	1 orang 1 orang	10 HP	Rp 23.200.000	September	√					September	√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
		dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan			PT KT AT	1 orang 1 orang 3 orang													
53	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan informasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	September	√					September	√			1 LHA
54	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan informasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	September	√					September	√			1 LHA
55	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan informasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan	2027	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	September	√					September	√			1 LHA
56	Puskesmas 1	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari		√		1 LHA
57	Puskesmas 1	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari		√		1 LHA
58	Puskesmas 2	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari		√		1 LHA
59	Puskesmas 3	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari		√		1 LHA
60	Puskesmas 4	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari		√		1 LHA
61	Puskesmas 5	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari		√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
62	Puskesmas 6	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari			√		1 LHA
63	Puskesmas 7	ATT Kepatuhan untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Puskesmas telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Februari		√				Februari			√		1 LHA
64	OPD 1	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
65	OPD 2	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
66	OPD 3	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
67	OPD 4	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
68	OPD 5	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
69	OPD 6	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
70	OPD 7	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
71	OPD 8	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
72	OPD 9	Audit Kepatuhan atas Belanja barjas dan modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan Belanja barjas dan modal telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 23.200.000	Nopember	√					Nopember			√		1 LHA
III	IRBAN BID. PEMERINTAHAN																			

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim	Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP				RMP				Jumlah LHA	
								Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II		III
A	Audit Ketaatan Pajak ADD dan DD TA 2024						Rp 123.000.000										
1	Tim 1	Audit Ketaatan Pajak ADD dan DD pada 5 desa	2024		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Maret	√					Maret	√		1 LHA
2	Tim 2	Audit Ketaatan Pajak ADD dan DD pada 5 desa	2024		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Maret	√					Maret	√		1 LHA
3	Tim 3	Audit Ketaatan Pajak ADD dan DD pada 5 desa	2024		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Maret	√					Maret	√		1 LHA
4	Tim 4	Audit Ketaatan Pajak ADD dan DD pada 5 desa	2024		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Maret	√					Maret	√		1 LHA
5	Tim 5	Audit Ketaatan Pajak ADD dan DD pada 5 desa	2024		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Maret	√					Maret	√		1 LHA
B	Audit Kinerja Berbasis Siswaskeudes						Rp 43.200.000										
1	Tim 1	Audit Kinerja berbasis aplikasi siswaskeudes 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	12 HP	Rp 21.600.000	Juli	√					Juli	√		1 LHA
2	Tim 2	Audit Kinerja berbasis aplikasi siswaskeudes 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	12 HP	Rp 21.600.000	Juli	√					Juli	√		1 LHA
C	Audit Dana Bumdes						Rp 36.800.000										
1	Tim 1	Melakukan Audit Keuangan dan Aset Pengelola Dana BUMDes Tahun Anggaran 2024 - 2025 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dana bumdes sudah sesuai dengan aturan perundangan	2024-2025		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Maret	√					Maret	√		1 LHA
2	Tim 2	Melakukan Audit Keuangan dan Aset Pengelola Dana BUMDes Tahun Anggaran 2024 - 2025 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dana bumdes sudah sesuai dengan aturan perundangan	2024-2025		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Maret	√					Maret	√		1 LHA
D	Audit Keuangan dan Aset pada kantor Kecamatan dan Kelurahan TA 2025						Rp 215.000.000										
1	Tim 1	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√			September		√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
2	Tim 2	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
3	Tim 3	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
4	Tim 4	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
5	Tim 5	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
6	Tim 6	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
7	Tim 7	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
8	Tim 8	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
9	Tim 9	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
10	Tim 10	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan dan aset sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	Agustus			√		September			√		1 LHA
E	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko TA 2026 Semester 1							Rp 221.400.000											
1	Tim 1	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni			√		Juli			√		1 LHA
2	Tim 2	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni			√		Juli			√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA		
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV			
3	Tim 3	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni				√		Juli				√		1 LHA
4	Tim 4	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni				√		Juli				√		1 LHA
5	Tim 5	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni				√		Juli				√		1 LHA
6	Tim 6	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni				√		Juli				√		1 LHA
7	Tim 7	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni				√		Juli				√		1 LHA
8	Tim 8	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni				√		Juli				√		1 LHA
9	Tim 9	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juni				√		Juli				√		1 LHA
F	Asistensi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi							Rp 27.700.000													
1	Tim 1	Asistensi penilaian mandiri SPIP Terintegrasi 1) Untuk meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam pemenuhan indikator penilaian SPIP Terintegrasi	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 6 orang	10 HP	Rp 27.700.000	Juli					√	September					√	1 LHA
G	Reviu Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri SPIP pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Tahun 2026							Rp 27.700.000													
1	Tim 1	Memberikan keyakinan terbatas atas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 6 orang	10 HP	Rp 27.700.000	Juli					√	September					√	1 LHA
H	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko TA 2026 Semester 2							Rp 221.400.000													
1	Tim 1	"Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026"	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November				√		Desember				√		1 LHA
2	Tim 2	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan	2026		PJ WPJ PT	1 orang 1 orang 1 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November				√		Desember				√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
		manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026			KT AT	1 orang 5 orang													
3	Tim 3	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November			√		Desember			√		1 LHA
4	Tim 4	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November			√		Desember			√		1 LHA
5	Tim 5	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November			√		Desember			√		1 LHA
6	Tim 6	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November			√		Desember			√		1 LHA
7	Tim 7	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November			√		Desember			√		1 LHA
8	Tim 8	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November			√		Desember			√		1 LHA
9	Tim 9	Evaluasi penerapan manajemen risiko 1) Untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko perangkat daerah tahun 2026	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	November			√		Desember			√		1 LHA
I	Asistensi Zona Integritas							Rp 18.400.000											
1	Tim 1	"Asistensi Zona Integritas 1) Untuk membantu instansi pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan/tata kelola yang baik, bersih, dan transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme"	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Mei			√		Juni			√		1 LHA
J	Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa							Rp 92.000.000											
1	Tim 1	Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa 1) Menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah dan alokasi dana desa	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	April		√			Mei			√		1 LHA
2	Tim 2	Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa 1) Menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah dan alokasi dana desa	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	April		√			Mei			√		1 LHA
3	Tim 3	Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	2026		PJ WPJ	1 orang 1 orang	10 HP	Rp 18.400.000	April		√			Mei			√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
		1) Menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah dan alokasi dana desa			PT KT AT	1 orang 1 orang 3 orang													
4	Tim 4	Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa 1) Menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah dan alokasi dana desa	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	April		√			Mei		√			1 LHA
5	Tim 5	Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa 1) Menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah dan alokasi dana desa	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	April		√			Mei		√			1 LHA
K	Reviu Manajemen ASN							Rp 21.500.000											
1	Tim 1	Reviu Manajemen ASN 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan proses pengadaan, promosi, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara sudah memenuhi kualifikasi terbatas secara administrasi maupun teknis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 21.500.000	April			√		Mei			√		1 LHA
L	Evaluasi Sakip							Rp 74.000.000											
1	Tim 1	Evaluasi Sakip 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan pada OPD utama	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 9 orang	10 HP	Rp 37.000.000	Februari			√		Februari			√		1 LHA
2	Tim 2	Evaluasi Sakip 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan pada OPD penunjang dan tambahan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 9 orang	10 HP	Rp 37.000.000	Maret	√				Maret		√			1 LHA
M	Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2026							Rp 29.040.000											
1	Tim 1	Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	12 HP	Rp 29.040.000	Februari	√				Februari		√			1 LHA
N	Reviu atas penilaian Reformasi Birokrasi							Rp 98.400.000											
1	Tim 1	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemda pada triwulan 1	2025-2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	April	√				April		√			1 LHA
2	Tim 2	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemda pada triwulan 2	2025-2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Juli	√				Juli		√			1 LHA
3	Tim 3	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-	2025-2026		PJ WPJ PT	1 orang 1 orang 1 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Oktober	√				Oktober		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
		upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemda pada triwulan 3			KT AT	1 orang 5 orang														
4	Tim 4	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemda pada triwulan 4	2025-2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 24.600.000	Januari 2027	√					Januari 2027				√	1 LHA
0	Audit ADD dan DD Tahun 2025							Rp 745.200.000												
1	Tim 1	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
2	Tim 2	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
3	Tim 3	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
4	Tim 4	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
5	Tim 5	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
6	Tim 6	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
7	Tim 7	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
8	Tim 8	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
9	Tim 9	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA
10	Tim 10	Audit ADD dan DD	2025		PJ WPJ PT	1 orang 1 orang 1 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
					Bulan	I			II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV				
		1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan			KT AT	1 orang 4 orang														
11	Tim 11	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
12	Tim 12	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
13	Tim 13	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
14	Tim 14	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
15	Tim 15	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
16	Tim 16	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
17	Tim 17	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
18	Tim 18	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
19	Tim 19	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
20	Tim 20	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA
21	Tim 21	Audit ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan Sudah sesuai dengan aturan perundangan	2025		PJ WPJ PT	1 orang 1 orang 1 orang	15 HP	Rp 31.050.000	April	√					April		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
					KT AT	1 orang 3 orang													
9	Tim 9	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
10	Tim 10	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
11	Tim 11	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
12	Tim 12	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
13	Tim 13	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
14	Tim 14	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
15	Tim 15	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
16	Tim 16	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
17	Tim 17	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
18	Tim 18	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA
19	Tim 19	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember	√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
20	Tim 20	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember		√			1 LHA
21	Tim 21	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember		√			1 LHA
22	Tim 22	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember		√			1 LHA
23	Tim 23	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember		√			1 LHA
24	Tim 24	Monitoring dan Evaluasi ADD dan DD 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 18.400.000	Desember	√					Desember		√			1 LHA
IV IRBAN KHUSUS/INVESTIGASI																				
1	Permintaan dari Aparat Penegak Hukum	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember				√	3 LHAPKKN
2	Permintaan dari Aparat Penegak Hukum	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember				√	3 LHAPKKN
3	Permintaan Audit Dari OPD	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember				√	1 LHA
4	Permintaan Audit Dari OPD	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember				√	1 LHA
5	Permintaan Audit Dari OPD	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember				√	1 LHA
6	Permintaan Audit Dari OPD	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA		
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV			
7	Permintaan dari Aparat Penegak Hukum dan Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Investigasi 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan; 3) Memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember					√	1 LHA
8	Permintaan dari Aparat Penegak Hukum dan Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Investigasi 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan; 3) Memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember					√	1 LHA
9	Laporan Pengaduan Masyarakat dan Perintah Pimpinan	Pemeriksaan Khusus 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan; 3) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember					√	1 LHP
10	Laporan Pengaduan Masyarakat dan Perintah Pimpinan	Pemeriksaan Khusus 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan; 3) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember					√	1 LHP
11	Laporan Pengaduan Masyarakat dan Perintah Pimpinan	Pemeriksaan Khusus 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan; 3) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember					√	1 LHP
12	Laporan Pengaduan Masyarakat dan Perintah Pimpinan	Pemeriksaan Khusus 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan; 3) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember					√	1 LHP
13	Laporan Pengaduan Masyarakat dan Perintah Pimpinan	Pemeriksaan Khusus 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan;	2025 dan 2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 22.900.000	Januari	√					Desember					√	1 LHP

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
		3) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya																	
14	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
15	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
16	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
17	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
18	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
19	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
20	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
21	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
22	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
23	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP
24	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT	1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember			√	1 LHP

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
					Bulan	I			II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV				
					KT AT	1 orang 1 orang														
25	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
26	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
27	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
28	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
29	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Permohonan Cerai ASN 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	5 HP	Rp 8.350.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
30	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Disiplin Pegawai 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 13.860.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
31	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Disiplin Pegawai 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 13.860.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
32	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Disiplin Pegawai 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 13.860.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
33	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Disiplin Pegawai 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 13.860.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
34	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Disiplin Pegawai 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 13.860.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP
35	Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Khusus Disiplin Pegawai 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2026		PJ WPJ PT	1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 13.860.000	Januari	√					Desember				√	1 LHP

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RMP					Jumlah LHA	
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV		
					KT AT	1 orang 1 orang														
36	Dinas-Dinas dalam Kabupaten	Konsulting	2026		-	-	-		Januari	√					Desember				√	Laporan Konsulting
								Rp 514.460.000												

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007